



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

OPTIMALISASI PENYERAPAN GAS BUMI NASIONAL

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Indonesia menghadapi tantangan dalam optimalisasi penyerapan gas bumi nasional karena adanya ketidakseimbangan antara produksi dan serapan gas bumi di beberapa wilayah Indonesia, serta krisis pasokan gas bumi untuk industri di Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumen gas bumi terbesar dalam negeri saat ini adalah industri sebesar 30,83%, listrik sebesar 11,82%, dan pupuk sebesar 11,72%. Tahun ini defisit gas bumi di wilayah Jawa bagian barat mencapai 144 *million standard cubic feet per day* (MMSCFD). Sementara di Jawa bagian timur terdapat eksese produksi sekitar 90 juta MMSCFD. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya krisis pasokan gas bumi untuk industri di Jawa Barat. Tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di daerah tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) sebagai pemasok utama. PGAS menyebutkan bahwa pasokan gas bumi yang diterima dari sejumlah lapangan migas mengalami penurunan produksi, termasuk pasokan gas bumi dari wilayah Sumatra. Sementara penyaluran gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat terkendala minimnya infrastruktur pipa gas bumi.

PGAS mencatat total kebutuhan gas bumi untuk industri di Jawa Barat saat ini mencapai 500-550 *billion british thermal unit per day* (BBTUD), namun PGAS belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut, dengan kekurangan sekitar 50 BBTUD. Diperkirakan defisit pasokan gas bumi akan terus meningkat dan dapat mencapai 370 BBTUD pada 2028. Untuk mengatasi kekurangan pasokan gas bumi untuk industri, PGAS sejak Mei 2024 mulai menyuplai *liquefied natural gas* (LNG) ke konsumen *existing* di Jawa Barat. Penyerapan LNG awalnya diproyeksikan 18-20 BBTUD, namun hingga saat ini mencapai hampir 45 BBTUD.

PGAS memproyeksikan kebutuhan gas bumi di Jawa bagian timur dan Jawa bagian tengah tahun 2024 sebanyak 253 BBTUD, sedangkan kemampuan pasokannya mencapai 264 BBTUD sehingga terjadi surplus 11 BBTUD. Kondisi *oversupply* di regional Jawa bagian timur dan Jawa bagian tengah diproyeksikan berlangsung hingga 2030. Di sisi lain, defisit gas bumi di regional Sumatra bagian tengah, Sumatra bagian selatan, dan Jawa bagian barat diproyeksikan akan semakin meningkat mulai 2024. Total kebutuhan gas bumi di 3 wilayah tersebut tahun ini diproyeksikan mencapai 585 BBTUD, sedangkan pasokan yang tersedia hanya 534 BBTUD sehingga terdapat defisit sekitar 50 BBTUD, dan akan meningkat signifikan pada tahun berikutnya karena berkurangnya pasokan.

Koordinator Perencanaan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Sugiarto, menyatakan bahwa strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia bagian barat dan timur, di mana pada Indonesia bagian barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian timur melalui *virtual pipeline* menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan *demand* antara barat dan timur. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan gas bumi nasional antara lain dengan membangun infrastruktur pipa gas bumi di Sumatra dan Jawa. Pemerintah akan membangun pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem)

pada tahun 2025 yang dibangun bertahap sepanjang 555 km dan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, yang bertujuan untuk menghubungkan transmisi gas bumi sepanjang Sumatra. Selain itu, pemerintah telah selesai membangun pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) tahap I (Semarang-Batang) tahun 2023, dan merencanakan pembangunan pipa gas bumi Cisem tahap II (Batang-Kandang Haur Timur) yang akan dimulai semester kedua 2024 dan ditargetkan selesai Desember 2025. Proyek ini diharapkan dapat menyelesaikan kendala distribusi dan memastikan pasokan gas bumi yang efisien dan merata di seluruh wilayah Jawa.

SKK Migas mengadakan Forum Gas Bumi 2024 pada tanggal 19-20 Juni 2024 dengan tujuan memfasilitasi kolaborasi antara produsen, pelaku *midstream*, dan pengguna akhir gas bumi. Optimalisasi penyerapan gas bumi diharapkan memberikan dampak signifikan. Dengan tersedianya pasokan gas bumi yang stabil dan merata, industri yang mengalami kekurangan pasokan dapat beroperasi lebih efisien. Tersedianya infrastruktur pendukung dan alternatif pembeli akan memberikan kepastian bagi investor hulu migas dalam mengembangkan lapangan-lapangan gas bumi baru, untuk mendukung pencapaian target produksi gas bumi 12 *billion standard cubic feet per day* (BSCFD) tahun 2030.

Atensi DPR

Ketidakseimbangan antara produksi dan serapan gas bumi di beberapa wilayah Indonesia, serta krisis pasokan gas bumi untuk industri di Jawa Barat perlu mendapat perhatian dari DPR RI, khususnya Komisi VII. Dari sisi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melakukan optimalisasi penyerapan gas bumi nasional, serta menyelesaikan pembangunan infrastruktur pipa gas bumi tepat waktu sehingga ketidakseimbangan pasokan gas bumi antarwilayah di Indonesia dapat teratasi dan kebutuhan pasokan gas bumi bagi industri dapat terpenuhi. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah melakukan percepatan pengembangan lapangan gas bumi baru agar target produksi gas bumi sebesar 12 BSCFD pada tahun 2030 dapat tercapai.

Sumber

antaranews.com, 21 Juni 2024;
Bisnis Indonesia, 21 Juni 2024;
kompas.com, 20 Juni 2024;
Kontan, 21 Juni 2024; dan
kontan.co.id, 20 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024